

Pengertian dan Teori Etika

Dra. Tina Ratnawati, M.Sc.
Dr. A. Sonny Keraf.



PENDAHULUAN

Setiap hari, di planet ini, puluhan ribu orang meninggal karena kelaparan, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Setiap hari, puluhan juta ton humus hilang karena erosi. Setiap hari, 10 dari 100 spesies kehidupan hampir mengalami kepunahan. Bahkan, setiap hari lebih dari 14 juta ayam dan 300 ribu sapi, babi, dan domba dibunuh untuk dikonsumsi manusia sebagai sumber pangan. Benarkah ini sesuatu yang wajar?

Arnold Gehlen, seorang antropolog-filsuf Jerman, pernah mendefinisikan manusia sebagai makhluk bebas lingkungan (*Umweltfreies Wesen*). Artinya, secara morfologis (bentuk konstitusi tubuh), manusia tidak terikat oleh lingkungan tertentu. Berbeda dengan binatang, misalnya organ-organ tubuh seekor rusa telah memastikan dia akan hidup di padang rumput, manusia mempunyai hubungan yang longgar dan bebas dengan lingkungannya. Karena lingkungannya tidak menentu, maka lingkungan manusia harus dicari dan bahkan harus dibangun. Ini karena tidak tersedia habitat yang spesifik untuk manusia. Akhirnya, bagi manusia, lingkungan bukanlah sesuatu yang diberikan dan tidak diterima secara *taken for granted* (bukan suatu gabe, atau suatu benda), melainkan merupakan suatu tugas, suatu Aufgabe, maka lingkungan memberikan kepada kita suatu tugas, kesempatan untuk berkeaktivitas, untuk menciptakan. Sebagai suatu Aufgabe, yang dipijakkan di atas etis kebaikan dan kebijaksanaan, maka manusia sebagai subyek yang memiliki akal pikiran tidak diperkenankan secara seenaknya memperlakukan alam. Alam adalah realitas yang hidup yang karenanya pula harus diperlakukan secara “manusiawi”. Cara memandang lingkungan ini sangat mempengaruhi manusia dalam mengelola lingkungan yang menjadi habitatnya. Abad ini kita telah menyaksikan perubahan-perubahan dalam dua faktor kunci yang menentukan realitas fisik dari hubungan kita dengan bumi, suatu ledakan populasi manusia yang tiba-tiba dan mengejutkan, serta peningkatan revolusi ilmiah dan teknologi yang tiba-tiba, yang memungkinkan kita memperbesar kekuatan untuk mempengaruhi

dunia di sekitar kita, dengan membakar, menebang, menggali, memindahkan dan mengubah zat fisik yang membentuk bumi.

Ledakan populasi yang begitu besar, dalam sejarahnya tampak sangat mengejutkan. Sejak manusia modern muncul 200 ribu tahun yang lalu sampai masa Julius Caesar, kurang dari 250 juta orang berada di permukaan bumi. Ketika Christopher Columbus berlayar ke dunia baru 1.500 tahun kemudian, kira-kira ada 500 juta orang di bumi. Pada waktu Thomas Jefferson menulis Proklamasi Kemerdekaan pada 1776, jumlah tersebut sudah menjadi dua kali lipat, yaitu 1 miliar. Pada pertengahan abad yang lalu, di akhir Perang Dunia II, jumlah populasi meningkat menjadi lebih dari 2 miliar orang. Tentu sebuah perkembangan luar biasa. Semakin padat penduduk bumi, tidak semakin lebar ukuran luas bumi, dan krisis justru semakin mengkhawatirkan.

PBB memperkirakan 2,7 miliar penduduk bumi kekurangan air minum pada 2025. Ledakan jumlah penduduk dunia dan perkembangan teknologi yang cepat semakin menjadi ancaman populasi keberlanjutan bumi. Krisis bumi semakin lama semakin terasa mengkhawatirkan. Keberlanjutan bumi sangat menentukan masa depan manusia itu sendiri. Perkembangan politik dunia yang "macho" ini, juga belum menaruh perhatian yang serius terhadap lingkungan hidup. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, pada 1992, yang menghasilkan paradigma pembangunan berkelanjutan, sebagai model pembangunan yang peduli lingkungan, hingga kini belum membawa perubahan yang berarti. Bahkan belum diimplementasikan dengan baik.

Perhatian terhadap etika lingkungan semakin mendapat perhatian yang serius. Cara pandang dan cara berpikir modern telah mengubah alam, atau bumi, menjadi serangkaian perabot mesin yang bagian-bagiannya dapat terpisah satu sama lain. Kelebihan penduduk dan teknologi industri telah menjadi penyebab terjadinya degradasi hebat pada lingkungan alam yang sepenuhnya menjadi gantungan hidup kita. Sebagai akibatnya, kesehatan dan kesejahteraan hidup kita menjadi terancam. Kota-kota besar menjadi tertutup oleh selimut asap kabut yang berwarna kehitam-hitaman dan terasa menyesakkan. Polusi udara telah sangat mengganggu kita. Di samping itu, kesehatan kita juga terancam oleh air yang kita minum dan makanan yang kita makan, yang keduanya tercemar oleh berbagai macam bahan kimia beracun. Akibatnya, racun kimia telah menjadi bagian yang semakin penting dalam kehidupan kita yang makmur ini. Telah jelas, bahwa teknologi kita sangat mengganggu, dan bahkan merusak sistem ekologi yang menjadi gantungan eksistensi kita.

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun pada lingkup nasional, sebagian besar bersumber pada perilaku manusia. Tragedi reaktor nuklir Chernobyl di bekas negara Uni Sovyet misalnya, reaksi fisika nuklir di dalam reaktor yang tidak terkontrol menyebarkan dampak radiasi tidak hanya pada lingkungan sekitar, akan tetapi melewati batas negara hampir seluruh negara Eropa. Dunia mengenalnya sebagai "*Tragedy of Common*". Contoh lain adalah kasus kebakaran hutan di Kalimantan, kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Indorayon Utama di Sumatra Utara dan PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya, yang sesungguhnya disebabkan oleh perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap lingkungan. Contoh lainnya adalah kasus *illegal logging*, impor limbah secara ilegal dari luar negeri, dan kasus perdagangan satwa liar. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya menyangkut orang per orang tetapi juga birokrasi pemerintah. Demikian pula, kasus sampah di DKI Jakarta, di kota Bandung beberapa tahun lalu, terkait dengan persoalan perilaku moral manusia, khususnya korupsi dalam tubuh birokrasi pemerintah.

Peranti teknologi saat ini memungkinkan manusia melakukan pembukaan lahan berskala luas. Dampaknya adalah pencemaran udara akibat pembakaran lahan tidak hanya terbatas pada masyarakat sekitar akan tetapi jauh meluas hingga ke negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Pencemaran lingkungan memang tidak mengenal satu batas wilayah negara. Semua permasalahan lingkungan sebagian besar bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Tragedi reaktor nuklir Chernobyl mungkin saja bisa dicegah bila birokrasi pemerintahan negara bekas komunis itu bisa berjalan efektif dan tidak korup. Kasus kebakaran hutan di Kalimantan bisa dicegah bilamana keserakahan para pengusaha HPH atau para pemilik modal yang ingin mendapatkan keuntungan besar bisa dihentikan.

Mengapa terhadap lingkungan diperlukan etika? Apa gunanya? Apa relevansinya? Bagaimanapun pertanyaan ini harus kita pahami dengan benar. Lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Manusia dapat mengarahkan teknologi ke arah mana saja, baik atau buruk, benar atau salah. Di sinilah letak peran etika, yang dapat mengarahkan perilaku manusia, baik atau buruk, benar atau salah.

Modul 1 ini menyajikan pembahasan tentang pengertian dan teori Etika. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, etika memandang alam sebagai kesatuan utuh yang saling melengkapi. Dengan memahami etika, secara tidak langsung kita akan dapat memahami dan menghayati keteraturan

sistem alam semesta, peranan manusia sebagai kholifah (pengelola) dan pemegang amanah dari Sang Pencipta di muka bumi, implikasinya pada sikap dan perilaku (etika atau akhlak) manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam secara keseluruhan, tanggung jawabnya secara moral baik sebagai individu, kelompok dan sebagai bangsa untuk senantiasa menjaga dan memelihara serta mengelola SDA dan lingkungan secara arif-bijaksana agar kualitas kehidupan manusia terus meningkat dan terhindar dari berbagai bencana dan kesulitan serta krisis baik ekonomi, sosial maupun budaya. Pentingnya kompetensi intelektual selalu dibangun dan diasah di atas landasan moral dan akhlak yang mulia sehingga kiprah manusia di berbagai bidang kehidupan dapat membawa manfaat dan kesejahteraan yang maksimal.

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat:

1. memberikan alasan mengapa etika lingkungan diperlukan dalam pengelolaan lingkungan,
2. menjelaskan pengertian etika,
3. menjelaskan pengertian moralitas
4. menjelaskan teori etika deontologi,
5. menjelaskan teori etika teleologi,
6. menjelaskan teori etika keutamaan.

Modul 1 terdiri atas 2 (dua) kegiatan belajar yaitu:

1. Kegiatan Belajar 1. Pengertian Etika Secara Etimologis
Dalam kegiatan belajar ini dibahas tentang pengertian etika secara etimologis.
2. Kegiatan Belajar 2. Teori Etika
Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas mengenai etika deontologi, etika teleologi, dan etika keutamaan.

Agar Anda dapat mencapai hasil belajar yang optimum, ikutilah semua petunjuk dalam modul ini dengan cermat. Baca semua uraian materi ini secara berulang, aplikasikan contoh yang ada ke dalam situasi lain, kerjakan latihan dengan sungguh-sungguh, dan baca rangkuman sebelum mengerjakan tes formatif!

Jika Anda melakukan disiplin yang tinggi dalam belajar, Anda pasti berhasil dan secara berangsur-angsur akan menjadi mahasiswa yang mampu mandiri dalam belajar.

Selamat Belajar, sukses bagi Anda!

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Etika secara Etimologis

Salah satu pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam mengelola lingkungan adalah mengapa kita perlu etika lingkungan? Apa perlunya berbicara mengenai etika lingkungan? Apa relevansinya? Apa gunanya? Jawaban atas pertanyaan ini terkait dengan rasa tanggung jawab kita sebagai pengelola (kholifah) bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah moral, persoalan perilaku manusia. Lingkungan hidup bukan semata-mata persoalan teknis. Demikian pula, krisis ekologi global yang kita alami dewasa ini adalah persoalan moral, krisis moral secara global. Oleh karena itu, perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya.

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan lainnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Mari kita ambil contoh yang lebih konkret. Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Inti Indorayon Utama di Sumatra Utara dan PT Freeport Indonesia di Papua sesungguhnya disebabkan oleh perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap lingkungan. Ini menyangkut tidak adanya kepedulian dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap lingkungan hidup. Contoh lainnya, *illegal logging*, impor limbah secara ilegal dari luar negeri, dan perdagangan satwa liar. Kasus-kasus ini tidak saja menyangkut orang per orang tetapi juga birokrasi pemerintah. Demikian pula, kasus sampah di DKI Jakarta, terkait dengan persoalan perilaku moral manusia, khususnya korupsi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Bahkan kasus-kasus lingkungan yang terkait dengan globalisasi perdagangan dan berbagai perjanjian internasional lainnya adalah persoalan moral menyangkut kelicikan manusia dan negara bangsa dalam melakukan manipulasi yang merugikan kepentingan orang lain, termasuk lingkungan hidup.

Menurut Arne Naess, krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap

alam secara fundamental dan radikal. Yang sekarang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi secara baru dalam alam semesta.

Dengan melihat persoalan ini, dapat dikatakan bahwa krisis lingkungan global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang keliru terhadap alam. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta seluruhnya. Dan inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang. Oleh karena itu, pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi baik dengan alam maupun dengan manusia lain dalam keseluruhan ekosistem.

Simak dan bacalah ilustrasi berikut, kemudian kajilah, benarkah etika lingkungan diperlukan dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan?.



“Jangan ciptakan Teluk Jakarta II”

Setiap hari Jakarta Raya menghasilkan 25.500 meter kubik limbah padat. Pemerintah DKI dapat mengelola 21.700 meter kubik. Dari yang tersisa, 1.400 meter kubik terbuang ke jaringan sungai yang mengalir di Jakarta dan sekitar 1.000 meter kubik sampah masuk Teluk Jakarta setiap hari. Bilamana pembuangan sampah tak terkendali dan volume yang masuk sungai menjadi dua kali lipat, bisa jadi Teluk Jakarta kedua dapat tercipta.

Teluk Jakarta merupakan tempat buang limbah cair dan padat hasil Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi

setelah melalui 13 sungai yang mengalir di Wilayah Jabotabek tersebut*. Empat sumber limbah ini ialah kegiatan industri yang menghasilkan logam berat seperti timah hitam dan air raksa, kegiatan pertanian yang menghasilkan sisa pestisida dan pupuk kimiawi yang larut dalam air teluk, praktik menangkap ikan dengan zat bius sianida, dan kegiatan rumah tangga lainnya.

Bila limbah cairan berisikan bahan kimia tersebut larut dalam air, limbah padat, khususnya bersumber dari kegiatan rumah tangga, mengapung di air teluk yang kedalaman rata-ratanya

hanya 15 meter. Sebanyak 51% limbah padat DKI berasal dari rumah tangga.

Semua limbah cair dan padat ini mencemari Teluk Jakarta dan mengancam kehidupan laut dan kepulauan Seribu. Dalam teluk seluas 514 kilometer persegi, Kepulauan Seribu terletak di dalamnya. Nusantara mini ini terdiri dari 108 pulau dengan luas rata-rata 10 hektare. Gugusan pulau ini terbentang sampai sejauh 60 km dalam arah Barat laut dan 30 km dalam arah barat ke timur

Secara ekologis, pulau-pulau ini rentan terhadap dampak manusia dan alam. Dampak ini mencakup pencemaran, perubahan ekosistem seperti pembabatan hutan *mangrove* dan eksploitasi sumber daya pantai seperti penambangan pasir.

Kerentanan Kepulauan Seribu terbukti dengan hilangnya sudah dari 108 pulau dalam 16 tahun terakhir ini. Lebih spesifik, pemakaian sianida untuk menangkap ikan tidak saja membuat cacat organ intern ikan, zat kimia itu juga membunuh terumbu karang. Sembilan dari sepuluh jenis terumbu karang akan mati dalam empat jam setelah diterpa sianida.

Degradasi teluk terlihat dari warna airnya: coklat hitam. Ini tanda air teluk telah diracuni ragam limbah industri, pertanian, rumah penduduk, dan zat apung akibat erosi tanah. Pesatnya urbanisasi Jakarta dengan meningkatnya jumlah penduduk menjadi 11 juta jiwa merupakan penyebab adanya limbah tersebut.

Sementara itu, mayoritas penduduk Kepulauan Seribu sendiri terlilit kemiskinan. Pulau-pulaunya kecil, terpencar dan jauh dari pasar. Sumber daya alamnya terbatas. Tolok ukur ekonomi yang merugikan ini diperparah dengan degradasi lingkungan akibat pencemaran teluk.

Persoalan pokok kini ialah dapatkah pengrusakan teluk dikurangi, bahkan dihentikan?. Lebih jauh lagi dapatkah Teluk Jakarta direhabilitasi?. Kini rangkaian kegiatan di tingkat masyarakat berlangsung untuk menekan pembuangan limbah padat secara sembarang yang akhirnya bermuara di teluk. Sebanyak 73% limbah padat itu merupakan benda organik, yaitu bahan dasar flora asal bumi dan dapat kembali ke bumi seperti sisa sayur-mayur dan buah-buahan. Karena itu, limbah organik ini dapat dijadikan kompos, yaitu pupuk yang dibuat dengan cara pemadatan dan pengeringan.



Limbah padat menutup rapat permukaan perairan sebuah dermaga di teluk Jakarta

Usaha-usaha telah dan sedang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang peduli akan kondisi kerusakan ini antara lain dengan membangun pusat daur ulang masyarakat, mengajarkan pendidikan lingkungan, dan pelatihan menangkap ikan dengan aman bagi nelayan. Bila penduduk Jakarta melakukan semua kegiatan sinergi dengan lingkungan secara terpadu, terarah, sinambung, dan sungguh-sungguh, Teluk Jakarta II tidak akan terjadi. Yang akan terjadi bukanlah teluk musibah, melainkan teluk teladan.**

- | | |
|---|---|
| ***) Disarikan dari Tata laut, Tertib Darat, Panduan Mengurangi Limbah Darat untuk Melindungi Laut (UNESCO, 2002) | 6. Pasar Minggu
7. Ciliwung
8. Kali Baru Timur
9. Cipinang
10. Sunter |
| *) Tigabelas sungai Jakarta dari Barat ke Timur: | 11. Buaran
12. Jati Kramat
13. Cakung |
| 1. Mookevert | |
| 2. Angke | |
| 3. Pesanggrahan | |
| 4. Grogol | |
| 5. Krokot | |

Kesalahan cara pandang yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan bersumber dari etika antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Manusia dianggap berada di luar, di atas, dan terpisah dari alam. Bahkan, manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri.

Etika antroposentrisme merupakan sebuah cara pandang Barat, yang bermula dari Aristoteles hingga filsuf-filsuf modern. Ada tiga kesalahan fundamental dari cara pandang ini. *Pertama*, manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial (*social animal*), yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Dalam pemahaman ini, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia di dalam komunitas sosialnya. Identitas dirinya dibentuk oleh komunitas sosialnya, sebagaimana dia sendiri ikut membentuk komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologis yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam.

Kedua, etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Jadi, yang disebut sebagai norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakuannya bagi manusia. Dalam paham ini, hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika tidak berlaku bagi makhluk lain di luar manusia.

Pemahaman etika seperti itu sebenarnya sudah mengalami perluasan. Dalam pemahaman tahap pertama, etika dipahami hanya berlaku bagi makhluk yang rasional dan bebas (*free and rational beings*). Konsekuensinya, etika tidak berlaku bagi mereka yang tidak berakal budi dan tidak bebas, seperti budak, perempuan, dan ras kulit berwarna. Budak dan perempuan hanya sekadar alat di tangan majikan dan laki-laki, yang bebas diperlakukan seenaknya tanpa boleh menuntut perilaku yang bermartabat. Oleh karena itu, apa pun perilaku yang majikan dan laki-laki perlakukan atau berikan terhadap mereka, tidak bisa dinilai sebagai tidak bermoral. Terkait dengan itu, budak dan perempuan, serta ras kulit berwarna, dianggap tidak memiliki hak asasi manusia.

Dari pemahaman etika yang sangat sempit dengan segala dampaknya dalam berbagai bentuk perilaku tidak beradab sepanjang sejarah umat manusia ini, muncul kesadaran baru untuk memperluas etika agar berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dalam pemahaman etika yang baru ini, budak, perempuan dan ras kulit berwarna harus diperlakukan secara bermoral. Semua manusia, tanpa terkecuali (termasuk budak dan perempuan), adalah makhluk yang bebas dan rasional. Puncak dari perluasan etika ini adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kendati perempuan di berbagai belahan dunia masih berjuang untuk benar-benar menikmati hak dan perlakuan bermoral secara sama dengan laki-laki, ini adalah sebuah perluasan cara pandang cukup maju.

Kelemahan cara pandang ini adalah, etika masih dibatasi hanya berlaku bagi manusia. Alam dan segala isinya masih tetap diperlakukan sebagai alat di tangan manusia. Maka, kemudian berkembang bahwa konsep mengenai etika dan perlakuan secara etis terhadap alam, apalagi ide mengenai adanya hak asasi alam, khususnya hak asasi binatang, merupakan sesuatu yang dianggap aneh dan tidak masuk akal. Aneh dan tidak masuk akal bahwa binatang dan tumbuhan mempunyai hak yang sama dengan manusia.

Kedua kelemahan yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, kini dikritik dan dikoreksi oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme. Bagi biosentrisme dan ekosentrisme, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia pertama-tama harus dipahami sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis. Manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh dan penuh, tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam

semesta. Makhluk yang menjalin ketergantungan timbal-balik saling menguntungkan dengan semua kehidupan lainnya, dan hanya melalui "jaring kehidupan" itu makhluk-makhluk bisa hidup dan berkembang menjadi diri sendiri. Tanpa alam, tanpa makhluk hidup lain, manusia tidak akan bertahan hidup, karena manusia hanya merupakan salah satu entitas di alam semesta. Seperti semua makhluk hidup lainnya, manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam "jaring kehidupan" di alam semesta ini. Jadi, manusia tidak berada di luar, di atas dan terpisah dari alam. Manusia berada dalam alam dan terikat serta tergantung dari alam dan seluruh isinya.

Dalam konsep etika biosentrisme dan ekosentrisme ini, artinya, manusia dibentuk oleh dan merealisasikan dirinya dalam alam. Alam membentuk dirinya sebagaimana ia sendiri ikut membentuk alam. Oleh karena itu, bagi biosentrisme dan ekosentrisme, komunitas biotis atau komunitas ekologis mempunyai peran penting, bahkan lebih penting dari komunitas sosial.

Dari pemahaman ini, biosentrisme dan ekosentrisme memperluas pemahaman etika, yang menganggap komunitas biotis atau komunitas ekologis sebagai komunitas moral. Etika tidak lagi dibatasi hanya bagi manusia. Etika dalam pemahaman biosentrisme dan ekosentrisme berlaku bagi semua makhluk hidup.

Dengan demikian, semua tuntutan moral yang berlaku dalam komunitas sosial manusia, kini berlaku juga terhadap komunitas biotis dan komunitas ekologis. Artinya, kewajiban dan tanggung jawab moral manusia tidak lagi hanya dibatasi terhadap sesama manusia. Manusia juga dituntut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua kehidupan di alam semesta, bahkan semua entitas yang abiotis.

Dalam konteks ini, konsep mengenai hak asasi alam, bukan sesuatu yang aneh dan tidak masuk akal. Konsep ini merupakan konsekuensi logis dari penerimaan bahwa komunitas biotis juga komunitas moral. Secara biologis dan ekologis, semua kehidupan di bumi mempunyai status moral yang sama, dan karena itu harus dihargai dan dilindungi haknya secara sama. Tentu saja, hak-hak ini tidak dimaksudkan sebagai hak individu binatang dan tumbuhan satu per satu, tetapi terutama hak individu binatang dan tumbuhan tersebut sebagai spesies yang sama dengan spesies manusia. Oleh karena itu, etika lingkungan dengan tegas menentang spesiesisme-paham yang menganggap hanya spesies manusia yang lebih unggul dari spesies lain sehingga manusia boleh memperlakukan spesies lain sesuka hatinya.

Apa yang dikemukakan dalam paham biosentrisme dan ekosentrisme ini sebenarnya hanya revitalisasi cara pandang dan perilaku masyarakat adat dalam interaksinya dengan alam. Dengan perkataan lain, etika lingkungan yang diperjuangkan dan dibela oleh biosentrisme dan ekosentrisme adalah kembali kepada etika masyarakat adat, yang dipraktikkan oleh hampir semua suku asli di seluruh dunia, tetapi tenggelam di tengah dominasi cara pandang dan etika Barat modern. Revitalisasi etika masyarakat adat ini sekaligus menegaskan kesalahan etika Barat dan kiranya juga etika agama-agama besar dan universal di dunia yang menganggap masyarakat yang mereka anggap kafir (termasuk masyarakat adat) sebagai tidak bermoral. Revitalisasi etika masyarakat adat membenarkan pendapat John Casey bahwa tidak seperti klaim etika Barat dan etika agama-agama universal, suku-suku asli yang dianggap kafir dalam perspektif agama besar sebenarnya mempunyai keutamaan moral yang tinggi.

Dalam konteks tersebut di atas, ekofeminisme sebagai sebuah model etika lingkungan hidup, mempunyai sumbangan tersendiri dalam membangun kesadaran serta perilaku moral yang baru dalam komunitas ekologis. Ekofeminisme melanjutkan perjuangan feminisme yang mendobrak dominasi laki-laki terhadap perempuan untuk mencakup perjuangan mendobrak dominasi manusia terhadap alam. Alam dan perempuan mempunyai nasib sama karena didominasi melalui cara pandang yang sama, yaitu cara pandang antroposentrisme atau bahkan lebih tepat androsentrisme. Ekofeminisme lalu menawarkan etika lingkungan yang agak berbeda dari etika yang dominan selama ini, yaitu etika yang terutama didasarkan pada kasih sayang, kepedulian, kesetaraan dan tanggung jawab terhadap kehidupan lain dalam suatu relasi setara dan harmonis dalam komunitas ekologis.

Ketiga, kesalahan cara pandang pada antroposentrisme tersebut diperkuat lagi oleh cara pandang atau paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang Cartesian dengan ciri utama mekanistik-reduksionistik. Dalam paradigma ilmu pengetahuan yang Cartesian, ada pemisahan yang tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek. Demikian pula, ada pemisahan yang tegas antara fakta dan nilai. Maka, paradigma ilmu pengetahuan modern yang mekanistik-reduksionistik ini membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bersifat otonom, sehingga seluruh perkembangan ilmu pengetahuan dikembangkan dan diarahkan hanya demi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penilaian mengenai baik buruk ilmu pengetahuan dan

teknologi beserta segala dampaknya dari segi moral atau agama, adalah penilaian yang tidak relevan. Hal ini melahirkan sikap dan perilaku manipulatif dan eksploitatif terhadap alam, dan pada gilirannya melahirkan berbagai krisis ekologi sekarang ini.

Untuk mengatasi krisis ekologi, perlu ada perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan yang tidak lagi bersifat mekanistik-reduksionistik tetapi bersifat holistik, juga ekologis. Dalam cara pandang holistik ini, tidak lagi ada pemisahan yang tegas antara subyek dan obyek, fakta, dan nilai. Ilmu pengetahuan dan teknologi beserta seluruh perkembangan dan dampaknya tidak bisa tidak harus dinilai pula secara moral, termasuk dalam kaitannya dengan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap lingkungan hidup.

Selain teori-teori etika lingkungan, dalam proses pengelolaan lingkungan yang lebih makro sangat terkait dengan kebijakan ekonomi dan politik. Bagaimana komitmen moral pemerintah sangat diperlukan bagi perlindungan lingkungan hidup. Komitmen moral ini diperlukan terutama, *pertama*, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan etika politik pembangunan nasional, untuk memberi tempat sentral kepada perlindungan lingkungan hidup dalam keseluruhan kebijakan pembangunan nasional. *Kedua*, komitmen moral diperlukan untuk membangun pemerintah yang bersih dan baik, yang memungkinkan pemerintah lebih serius dalam menjaga lingkungan hidup, termasuk secara konsekuen mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan hidup. *Ketiga*, komitmen pemerintah juga dibutuhkan untuk membangun suatu kehidupan ekonomi global yang lebih pro kepada lingkungan hidup, tidak menjadikan lingkungan hidup sekadar sebagai alat untuk kepentingan ekonomi dan politik berbagai negara, khususnya negara-negara maju. Tanpa komitmen moral ini dan berarti tanpa etika tata praja yang baik, krisis lingkungan global akan sulit diatasi.

Jika kita menuntut adanya suatu perubahan radikal dalam etika masyarakat modern, maka diperlukan suatu etika baru yang tidak hanya berlaku untuk interaksi manusia, tetapi juga interaksi manusia dengan seluruh kehidupan di bumi. Suatu etika yang memandang alam sebagai bernilai pada dirinya sendiri dan pantas diperlakukan secara bermoral. Dengan etika baru ini, manusia dituntut untuk menjaga dan melindungi alam beserta segala isinya. Alam dan seluruh isinya tidak sekadar bernilai instrumental-ekonomis bagi kepentingan manusia untuk dieksploitasi.

Selanjutnya, bagaimana etika yang baru ini dapat direalisasikan? Para pendukung etika biosentrisme dan ekosentrisme menyadari bahwa etika baru

ini tidak bisa direalisasikan oleh manusia modern yang terbiasa berpikir dan berperilaku dalam kerangka paradigma etika lama yang antroposentris. Untuk merealisasikan etika baru ini diperlukan komitmen bersama, yang bersinergi menjadi sebuah gerakan. Oleh karena itu, etika baru ini harus menjadi sebuah gerakan bersama secara global dengan melibatkan semua kelompok masyarakat untuk bisa bersama-sama membangun budaya baru, etika baru, gaya hidup baru yang disebut Arne Naess sebagai *ecosophy* gerakan kearifan merawat bumi sebagai sebuah rumah tangga untuk menjadikannya tempat yang nyaman bagi semua kehidupan. Dengan membangun gerakan bersama seperti itu, budaya baru tadi bisa dimulai, dipertahankan, diajarkan dan diwariskan dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lain, dari satu generasi ke generasi lain.

Gerakan bersama ini sangat diperlukan, karena krisis ekologi yang terjadi sudah sampai pada tahap memprihatinkan. Oleh sebab itu, gerakan etika baru tadi merupakan sebuah keharusan moral sekarang ini juga. Krisis ekologi adalah krisis kehidupan, sehingga menyelamatkan krisis ekologi berarti menyelamatkan kehidupan. Hal itu bisa dilakukan dengan mengubah pola hidup kita, sebagai individu dan kelompok sekarang juga.

A. PENGERTIAN ETIKA DAN MORALITAS

Sebelum kita membahas lebih dalam tentang teori etika, akan dibahas terlebih dahulu mengenai etika dan moralitas. Pembahasan mengenai konsep etika dan moralitas ini penting untuk diketahui agar, *pertama*, ada kesamaan pemahaman tentang etika. *Kedua*, pemahaman ini akan membantu kita dalam membahas permasalahan-permasalahan di bidang lingkungan dari perspektif etika. *Ketiga*, pemahaman ini akan membantu kita mencari etika yang sesuai dan dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan.

Pembahasan mengenai beberapa teori etika yang dikenal hingga sekarang akan disajikan pada kegiatan Belajar 2 dari Modul 1. ini. Teori-teori etika ini penting untuk dibahas secara mendalam terutama dalam menjawab pertanyaan moral: "Apa yang harus saya lakukan?", "Bagaimana harus bertindak?", khususnya di bidang pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, pembahasan teori etika akan membantu kita terutama dalam beberapa hal berikut ini. *Pertama*, mengembangkan perilaku baik secara individu maupun kelompok dalam kaitan dengan lingkungan. *Kedua*, mengembangkan sistem sosial dan politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan.

Pada bagian pendahuluan telah digambarkan mengapa etika penting dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, secara lebih mendalam, pada Kegiatan Belajar 1. ini akan dibahas terlebih dahulu tentang etika dan moralitas. Kita perlu menyamakan pemahaman tentang etika karena dalam kehidupan sehari-hari, terjadi begitu banyak salah pengertian dan kerancuan tentang etika. Dalam masyarakat, sering kali orang menggunakan kata etika dalam pengertian yang salah. Selain itu, pada bagian ini juga akan dibahas pengertian tentang moralitas, karena etika dan moralitas sering digunakan secara tertukar, atau digunakan dalam pengertian yang berbeda secara rancu. Walaupun demikian, kesalahan pemakaian kedua kata ini tidak sepenuhnya salah, karena, baik etika maupun moralitas mempunyai pengertian yang sama tetapi juga bisa berbeda. Yang penting, kedua pengertian ini harus dipahami dan dapat diterapkan secara tepat.

Secara teoretis, etika mempunyai pengertian, sebagai berikut. *Pertama*, secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani *ethos* (jamaknya: *to etha*), yang berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.

Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya menyangkut baik-buruk perilaku manusia. Singkatnya, kaidah ini menentukan apa yang baik harus dilakukan dan apa yang buruk harus dihindari. Oleh karena itu, etika sering dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Atau, etika juga dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

Kaidah, norma atau aturan ini sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu, yaitu apa yang dianggap baik dan penting oleh masyarakat tersebut untuk dikejar dalam hidup ini. Dengan demikian, etika juga berisikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus dijadikan pegangan dalam menuntun perilaku. Sekaligus juga berarti, etika memberi kriteria bagi penilaian moral tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apakah suatu tindakan dan keputusan dinilai sebagai baik atau buruk secara moral. Kriteria ini yang dianggap sebagai nilai dan prinsip moral.

Dari pengertian tersebut di atas, etika secara lebih luas dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup, dan bertindak sebagai orang yang baik. Etika memberi petunjuk, orientasi, arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia.

Yang menjadi pusat perhatian di sini adalah hidup baik sebagai manusia. Si A dinilai sebagai orang baik dalam kualitasnya sebagai manusia. Seorang guru bisa dinilai sebagai guru yang baik dalam hal dia mengajar dengan sangat *menarik*, mempersiapkan diri sebelum mengajar, dan sebagainya. Akan tetapi, dia bukan orang yang baik, kalau dia memberi nilai secara diskriminatif dan tidak obyektif, memperjualbelikan nilai, dan seterusnya. Yang terakhir dijelaskan dalam paragraf ini adalah termasuk penilaian moral.

Pengertian etika sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, justru sama dengan pengertian moralitas. Secara etimologis, moralitas berasal dari kata Latin *mos* (jamaknya: *mores*) yang juga berarti "adat-istiadat" atau "kebiasaan". Jadi, dalam pengertian harfiah, etika dan moralitas sama-sama berarti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan (baik perintah atau larangan) tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Dalam arti itu, keduanya berbicara tentang nilai dan prinsip moral yang dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pedoman dan kriteria dalam berperilaku sebagai manusia.

Pada umumnya, sistem nilai, yang telah dihidupi sebagai sebuah kebiasaan hidup yang baik, diturunkan dan diwariskan melalui agama dan kebudayaan, yang dianggap sebagai sumber utama norma dan nilai moral. Ini tidak berarti bahwa norma dan nilai moral yang dikenal dan diajarkan dalam satu agama dan kebudayaan dengan sendirinya berbeda dari norma dan nilai yang dikenal dan diajarkan dalam agama dan kebudayaan lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa norma dan nilai moral yang dianut dalam semua agama dan kebudayaan sampai tingkat tertentu sesungguhnya sama. Alasan sederhananya, karena etika dan moralitas berbicara tentang baik-buruk perilaku manusia sebagai manusia terlepas dari agama dan kebudayaan. Yang berbeda sesungguhnya adalah hanya menyangkut prioritas atau penekanan yang berlainan di antara berbagai agama dan kebudayaan (yang satu menekankan dan mengutamakan cinta kasih, yang lain menekankan dan mengutamakan sikap saling percaya atau kejujuran, dan sebagainya). Selain itu, yang juga berbeda adalah, penerapan dari nilai moral yang sama. Dalam kasus *euthanasia*, misalnya, yang satu membenarkan dokter mencabut alat-alat bantu agar saudaranya

yang berada dalam keadaan koma bisa meninggal dengan tenang. Sementara yang lain, tetap berusaha memberikan segala bantuan medis untuk mempertahankan hidup saudaranya itu, sampai Tuhan sendiri yang mencabut nyawanya. Di balik tindakan yang berbeda ini ada nilai moral yang sama yaitu sama-sama mencintai saudaranya tersebut. Pada kasus yang satu, karena sangat mencintainya, mereka tidak tega membiarkan dia menderita sehingga membiarkan dia pergi menghadap Sang Pencipta. Pada kasus yang lain, justru karena cintanya kepada saudaranya itu maka mereka berjuang untuk mempertahankan hidupnya dan tidak membiarkan pergi menghadap sang Pencipta.

Kedua, etika dipahami juga dalam pengertian yang berbeda dengan moralitas. Dalam pengertian ini, etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret. Bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia? Bagaimana manusia harus bertindak? Terhadap pertanyaan ini, etika dan moralitas dalam pengertian pertama akan menjawab: bertindaklah sebagaimana kebiasaan, norma dan nilai yang dikenal sejauh ini. "Dengan kata lain, ada pegangan baku dalam bentuk norma dan nilai tertentu yang siap pakai. Misalnya, janji harus ditepati, jangan menipu, katakan yang sejujurnya, bantulah orang yang berada dalam kesulitan, dan sebagainya. Tetapi, dalam situasi konkret sehari-hari, jawaban dari etika dan moralitas dalam pengertian pertama belum tentu memadai dan membantu. Sering kali, situasi konkret yang dihadapi adalah situasi dilematis, situasi di mana kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan nilai yang sama-sama sahnya, dan kita hanya bisa memilih salah satu dan berarti melanggar yang lain. Dalam situasi demikian, etika dan moralitas dalam pengertian pertama tidak memadai.

Oleh karena itu, kita membutuhkan etika dalam pengertian kedua, berupa refleksi kritis untuk menentukan pilihan, menentukan sikap, dan bertindak secara benar sebagai manusia. Refleksi kritis ini menyangkut tiga hal. Pertama, refleksi kritis tentang norma dan nilai yang diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian pertama, tentang norma dan nilai yang kita anut selama ini. Apakah norma dan nilai moral itu harus saya patuhi begitu saja dalam situasi konkret yang saya hadapi? Ataukah, saya boleh melanggarnya? Atas dasar apa saya boleh melanggarnya, tetapi kendati demikian saya tetap

bertindak sebagai orang yang baik? Kedua, refleksi kritis tentang situasi khusus yang kita hadapi dengan segala keunikan dan kompleksitasnya. Ketiga, refleksi kritis tentang berbagai paham yang dianut oleh manusia atau kelompok masyarakat tentang apa saja. Misalnya, paham tentang manusia, Tuhan, alam, masyarakat dan sistem sosial-politik, sistem ekonomi, kerja, dan sebagainya. Refleksi kritis yang ketiga ini penting untuk menentukan pilihan dan prioritas moral yang akan diutamakan, baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam situasi dilematis.

Ketiga hal ini harus dikaji dan dipertimbangkan secara kritis untuk sampai kepada sebuah keputusan, mana di antara norma dan nilai yang saling bertentangan itu yang harus pilih. Berdasarkan refleksi kritis itu, kita harus yakin bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan dalam situasi khusus itu benar, dan menurut keyakinan moral kita semua orang yang berada dalam situasi yang sama akan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan.

Pada tingkat ini, etika membutuhkan evaluasi kritis atas semua dan seluruh situasi terkait-tergantung dari berat ringan dan kompleks tidaknya, kasus itu. Ada kasus yang membutuhkan keputusan moral secepatnya, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lama sebelum mengambil keputusan. Hal ini karena diperlukan informasi sebanyak mungkin yang menyangkut kasus tersebut, baik kasus konkret itu sendiri, dampaknya, siapa yang terkena dampaknya, apa yang terkena, kerugian yang ditimbulkan, pro dan kontra, dan sebagainya. Untuk itu, etika membutuhkan bantuan dari berbagai disiplin ilmu untuk bisa sampai pada keputusan moral yang benar. Oleh karena itu, etika juga dianggap sebagai sebuah ilmu interdisipliner. Sebagai ilmu interdisipliner, di satu pihak ia bertumpu pada norma dan nilai sebagaimana diberikan oleh etika dan moralitas dalam pengertian pertama. Di pihak lain, ia mengandalkan informasi dan kajian dari ilmu-ilmu lain untuk bisa mengambil keputusan moral yang tepat, baik sebelum melakukan suatu tindakan maupun dalam mengevaluasi suatu tindakan atau kebijakan yang diambil.

Sebagai contoh, lihat kasus imajiner ini. Pada suatu sore, seorang pemuda lari terbirit-birit masuk ke rumah Anda dalam keadaan ketakutan dan sangat terancam. Ia meminta perlindungan di rumah Anda, dan memohon agar ia diizinkan bersembunyi di rumah Anda. Sebagai orang baik Anda merasa harus langsung menolongnya dengan mengizinkan bersembunyi di rumah Anda. Selang beberapa menit kemudian, datang orang lain yang

bertanya kepada Anda apakah ada orang yang lari masuk bersembunyi di rumah Anda. Pertanyaan moral yang harus dijawab di sini adalah: Apa yang harus Anda lakukan? Mengatakan sejujurnya bahwa orang yang dicari itu ada di rumah Anda, atau berbohong? Di sini ada nilai kejujuran, kepercayaan (Anda dipercaya untuk menyelamatkan nyawa orang yang bersembunyi di rumah Anda), janji harus ditepati (Anda berjanji untuk melindunginya) dan ada nilai nyawa orang tadi (seandainya diserahkan begitu saja, karena mau jujur, orang itu bisa dipukul babak belur dan mungkin mati). Kalau begitu, apa yang harus Anda lakukan?

Dalam kasus ini, etika dan moralitas dalam pengertian pertama tidak memadai, karena ada situasi dilematis ketika kita harus memilih nilai tertentu dengan melanggar nilai lainnya. Dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan etika dalam pengertian kedua. Kita perlu melakukan refleksi kritis untuk memutuskan tindakan yang tepat menurut pertimbangan yang sangat matang. Dalam hal ini, kita harus memutuskan secara otonom, dalam pengertian bahwa dalam kasus tertentu kita bisa meminta masukan dan pertimbangan dari orang lain (kalau situasi memungkinkan), tetapi pada akhirnya, hanya kita sendiri yang harus memutuskan berdasarkan keyakinan moral kita (yang berarti berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan hidup yang dianut).

Tidak berarti kita lalu memutuskan sesuka hati. Sebagai mana dikatakan Immanuel Kant, kita memutuskan secara otonom dalam kerangka dan berdasarkan sikap hormat pada nilai-nilai dan hukum universal yang tertanam dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itu, kendati memutuskan secara otonom, kita harus terbuka kepada pertimbangan dan gugatan pihak lain. Kita terbuka bahwa orang lain bisa saja mempersoalkan dan mengecam tindakan yang kita lakukan. Kita pun terbuka untuk mempertanggungjawabkan tindakan kita sekaligus mengubahnya (kalau masih bisa diubah) kalau ternyata keliru.

Dengan kedua pembedaan ini, etika lingkungan hidup yang dipaparkan bahasan ini adalah etika dalam pengertian kedua: sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitan dengan lingkungan dan refleksi kritis tentang cara pandang manusia tentang manusia, alam dan hubungan antara manusia dan alam serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Dari refleksi kritis ini lalu dihadapkan cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat terutama dalam kerangka menyelamatkan krisis lingkungan.

Demikianlah uraian Kegiatan Belajar 1, Modul 1. tentang pengertian etika. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Pengertian Etika secara Etimologis, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian etika secara etimologis!
- 2) Jelaskan mengapa pengertian etika sama dengan pengertian moralitas!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Asal kata etika, pengertian etika, dan kaitan etika dengan kebiasaan hidup yang baik pada masyarakat. satu generasi ke generasi lain.
- 2) Asal kata moralitas, pengertian kata moralitas, pengertian harfiah etika dan moralitas.



RANGKUMAN

Penyamaan pemahaman tentang etika masih diperlukan karena dalam kehidupan sehari-hari, terjadi begitu banyak salah pengertian dan kerancuan tentang etika. Dalam masyarakat, seringkali orang menggunakan kata etika dalam pengertian yang salah.

Selain pemahaman tentang etika, kita perlu juga mengetahui pengertian tentang moralitas, karena etika dan moralitas sering digunakan secara tertukar, atau digunakan dalam pengertian yang berbeda secara rancu.

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani *ethos* (jamaknya: *to etha*), yang berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.

Secara etimologis, moralitas berasal dari kata Latin *mos* (jamaknya: *mores*) yang juga berarti "adat-istiadat" atau "kebiasaan". Jadi, dalam pengertian harfiah, etika dan moralitas sama-sama berarti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan (baik perintah atau larangan) tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Dalam arti itu, keduanya berbicara tentang nilai dan prinsip moral yang dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pedoman dan kriteria dalam berperilaku sebagai manusia.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam Kegiatan Belajar 1 ini dibahas pengertian etika secara
 - A. filologis
 - B. etimologis
 - C. harfiah
 - D. asal kata

- 2) Etika diperlukan dalam pengelolaan lingkungan berkaitan dengan tugas manusia sebagai
 - A. kholifah
 - B. pewaris lingkungan
 - C. perusak lingkungan
 - D. pemerhati lingkungan

- 3) Salah seorang filsuf yang memberi keyakinan pada kita bahwa kita harus memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan moral kita adalah
 - A. Imanuel Kant
 - B. Laplace
 - C. Newton
 - D. Einstein

- 4) Secara etimologi, kata “etika” berasal dari bahasa
 - A. Latin
 - B. Yunani
 - C. Spanyol
 - D. Jerman

- 5) Secara etimologi, kata moralitas berasal dari bahasa
- A. Latin
 - B. Yunani
 - C. Spanyol
 - D. Jerman

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Teori Etika

Saudara mahasiswa, pada Kegiatan Belajar 1. telah dipelajari mengenai pengertian etika secara etimologis. Pada kegiatan belajar 2. ini akan dipelajari mengenai Teori Etika.

Telah dijelaskan pada Kegiatan Belajar 1. bahwa teori-teori etika penting untuk dibahas secara mendalam terutama dalam menjawab pertanyaan moral: "Apa yang harus saya lakukan?", "Bagaimana harus bertindak?", khususnya di bidang pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, pembahasan teori etika akan membantu kita terutama dalam beberapa hal berikut ini. *Pertama*, mengembangkan perilaku baik secara individu maupun kelompok dalam kaitan dengan lingkungan. *Kedua*, mengembangkan sistem sosial dan politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan.

Karena etika berkaitan dengan refleksi kritis, maka untuk menjawab pertanyaan, "bagaimana kita harus bertindak dalam situasi konkret tertentu", ada tiga jawaban berbeda. Jawaban pertama dikenal sebagai teori deontologi, jawaban kedua dikenal sebagai teori teleologi, dan jawaban ketiga dikenal sebagai etika keutamaan. Ketiga teori ini juga berguna untuk menjawab pertanyaan, "bagaimana menilai suatu tindakan yang baik secara moral?". Berikut adalah pembahasan mengenai ketiga teori ini.

A. ETIKA DEONTOLOGI

Istilah "deontologi" berasal dari kata Yunani *deon*, yang berarti kewajiban, dan *logos* berarti ilmu atau teori. Terhadap pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu, deontologi menjawab: lakukan apa yang menjadi kewajibanmu sebagaimana terungkap dalam norma dan nilai-nilai moral yang ada. Sejalan dengan itu, menurut etika deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil adalah tindakan yang

baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Demikian pula, sikap hormat terhadap alam, misalnya, akan dianggap baik kalau itu dianggap sebagai sebuah kewajiban moral.

Dengan demikian, etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut: baik atau buruk. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral suatu tindakan. Hal ini akan membuka peluang bagi subjektivitas dan rasionalisasi yang menyebabkan kita ingkar akan kewajiban-kewajiban moral. Immanuel Kant (1734-1804) menolak akibat suatu tindakan sebagai dasar untuk menilai tindakan tersebut karena akibat tadi tidak menjamin universalitas dan konsistensi kita dalam bertindak dan menilai suatu tindakan.

Dalam perspektif ini, membuang limbah ke sungai, misalnya, akan dinilai buruk secara moral bukan karena akibatnya yang merugikan. Tindakan ini dinilai buruk karena tidak sesuai dengan kewajiban moral untuk hormat kepada alam (*respect for nature*).

Atas dasar itu, etika deontologi sangat menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban. Bahkan menurut Kant, kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Maka, dalam menilai tindakan kita, kemauan baik harus dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari segalanya.

Menurut Kant, kemauan baik adalah syarat mutlak untuk bertindak secara moral. Kemauan baik menjadi kondisi yang mau tidak mau harus dipenuhi agar manusia dapat bertindak secara baik, sekaligus membenarkan tindakannya itu. Maksudnya, bisa saja akibat dari suatu tindakan memang baik, tetapi kalau tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kemauan baik untuk menaati hukum moral yang merupakan kewajiban seseorang, tindakan itu tidak bisa dinilai baik. Akibat baik tadi bisa saja hanya merupakan sebuah kebetulan.

Atas dasar itu, menurut Kant, tindakan yang baik adalah tindakan yang tidak saja sesuai dengan kewajiban tetapi karena dijalankan berdasarkan dan demi kewajiban. Ia menolak segala tindakan yang bertentangan dengan kewajiban sebagai tindakan yang baik, walaupun tindakan itu mendatangkan konsekuensi yang baik. Demikian pula, semua tindakan yang dilaksanakan sesuai dengan kewajiban, tetapi tidak didasarkan pada kemauan baik untuk menghormati perintah universal, melainkan, misalnya, karena terpaksa, akan

dianggap sebagai tindakan yang tidak baik. Dalam kaitan dengan ini, hal yang juga prinsip dan penting bagi Kant, yaitu melakukan suatu tindakan moral haruslah dengan kemauan keras atau otonomi bebas.

Secara singkat, menurut Kant ada tiga hal yang harus dipenuhi: (1) supaya suatu tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban. (2) Nilai moral suatu tindakan bukan tergantung dari tercapainya tujuan tindakan itu melainkan pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut, walaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. (3) Konsekuensi dari kedua hal tersebut, kewajiban untuk mematuhi hukum moral universal adalah hal yang niscaya bagi suatu tindakan moral.

Bagi Kant, hukum moral telah tertanam dalam hati setiap orang dan karena itu bersifat universal. Hukum moral itu dianggap sebagai perintah tak bersyarat (imperatif kategoris), yang berarti hukum moral itu berlaku bagi semua orang pada segala situasi dan tempat. Ia mengikat siapa saja dari dalam dirinya sendiri karena hukum moral itu telah tertanam dalam hati setiap orang.

Untuk menjelaskan hukum moral universal ini, Kant membedakan antara perintah tak bersyarat dan perintah bersyarat (imperatif hipotetis). Perintah bersyarat adalah perintah yang hanya akan dilaksanakan kalau orang menghendaki akibatnya, atau kalau akibat dari tindakan itu merupakan hal yang diinginkan. Jadi, perintah itu baru akan dilaksanakan kalau syaratnya dipenuhi, yaitu kalau tercapai akibat yang dikehendaki. Sebaliknya, perintah tak bersyarat adalah perintah yang dilaksanakan begitu saja tanpa syarat apa pun, yaitu tanpa mengharapkan akibat, atau tanpa mempedulikan apakah akibatnya tercapai dan berguna bagi orang tersebut atau tidak. Norma atau hukum moral merupakan perintah tak bersyarat.

Bagi Kant, ada tiga prinsip atau hukum universal yang merupakan perintah tak bersyarat. *Pertama*, prinsip universalitas, yaitu bertindak hanya atas dasar perintah yang kamu sendiri kehendaki akan menjadi sebuah hukum universal. Bagi Kant, kita mempunyai kewajiban untuk mematuhi apa yang kita anggap benar dan akan juga dilakukan orang lain. Oleh karena itu, kalau kita menuntut orang untuk bertindak secara tertentu sesuai dengan hukum moral, kita sendiri pun harus bertindak seperti itu.

Kedua, sikap hormat kepada manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Hukum universal yang harus dipegang adalah bertindaklah sedemikian rupa agar kita memperlakukan manusia, apakah diri kita sendiri

ataupun orang lain, selalu sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah hanya sebagai alat. Bagi Kant, manusia mempunyai harkat dan martabat yang luhur sehingga tidak boleh diperlakukan secara tidak adil, ditindas, diperas demi kepentingan lain. Demikian pula, kita tidak boleh membiarkan diri kita diperalat, diperas, diperlakukan sewenang-wenang, dan membiarkan hak kita dirampas. Kita harus menuntut agar hak kita dihargai secara layak.

Ketiga, prinsip otonomi. Kita harus bertindak berdasarkan kemauan dan pilihan sendiri karena yakin hal itu baik, dan bukan karena diperintah dari luar (*heteronomi*). Oleh karena itu, bagi Kant, suatu tindakan akan dianggap baik secara moral kalau tindakan itu dilakukan berdasarkan kemauan bebas, dan pilihan bebas kita. Walaupun tindakan itu dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kewajiban kita akan hukum moral universal, itu dilakukan karena kita sendiri menghendaki demikian. Kita menghendaki demikian, karena kita menganggapnya benar. Jadi, kewajiban untuk mematuhi hukum moral universal adalah kewajiban yang muncul dari kehendak bebas kita karena kesadaran bahwa hal itu baik. Dalam hal ini, kita bertindak demikian bukan sekadar asal sesuai dengan kewajiban, melainkan karena kita sendiri menghendaki apa yang menjadi kewajiban kita.

Ini penting karena Kant ingin menghindari dua hal. *Pertama*, Kant ingin kita tidak terjebak memperlakukan perintah moral-yang adalah perintah tak bersyarat-sebagai perintah bersyarat. Misalnya, kita mau berbuat baik, bertindak adil, menghargai hak orang lain, dengan niat agar dengan itu kita akan masuk surga. Bagi Kant, berbuat baik adalah perintah tak bersyarat yang atas kemauan kita sendiri harus kita laksanakan terlepas dari apakah ada surga atau tidak, apakah dengan demikian kita akan masuk surga atau tidak. Kedua, dengan ini Kant ingin menghindari sikap heteronom. Sikap yang hanya mau bertindak secara moral karena diperintahkan dari luar, atau karena faktor-faktor di luar diri kita, misalnya ketika atau untuk dilihat orang lain.

Ada dua kesulitan yang dapat diajukan terhadap teori deontologi, khususnya terhadap teori deontologi Kant. *Pertama*, dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi situasi yang dilematis, etika deontologi tidak memadai untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita harus bertindak dalam situasi konkret yang dilematis itu. Ketika ada dua atau lebih kewajiban yang saling bertentangan, ketika kita harus memilih salah satu sambil melanggar yang lain, etika deontologi tidak banyak membantu karena hanya mengatakan: bertindaklah sesuai dengan kewajibanmu.

Kesulitan ini kemudian dipecahkan oleh WD. Ross dengan mengajukan prinsip *prima facie*. Menurut Ross, dalam kenyataan hidup ini, kita menghadapi berbagai macam kewajiban moral bahkan bersamaan dalam situasi yang sama. Dalam situasi seperti ini, kita perlu menemukan kewajiban terbesar dengan membuat perbandingan antara kewajiban-kewajiban itu. Untuk itu, Ross memperkenalkan perbedaan antara kewajiban *prima facie* dan kewajiban-kewajiban aktual. Kewajiban *prima facie* adalah kewajiban yang selalu harus dilaksanakan kecuali kalau bertentangan dengan kewajiban lain yang sama atau lebih besar.

Persoalan *kedua*, sebagaimana dikatakan oleh John Stuart Mill, para penganut etika deontologi sesungguhnya tidak bisa mengelakkan pentingnya akibat dari suatu tindakan untuk menentukan apakah tindakan itu baik atau buruk. Para penganut etika deontologi secara diam-diam menutup mata terhadap pentingnya akibat suatu tindakan supaya bisa memperlihatkan pentingnya nilai suatu tindakan moral itu sendiri. Kant sendiri tidak mengabaikan pentingnya akibat suatu tindakan. Hanya saja, ia ingin menekankan pentingnya kita menghargai tindakan tertentu sebagai bermoral karena nilai tindakan itu sendiri, dan tidak terlalu terjebak dalam tujuan menghalalkan cara. Lebih dari itu, Kant ingin menekankan pentingnya hukum moral universal dalam hati kita masing-masing, sekaligus mencegah subjektivitas kita dalam bertindak secara moral. Tanpa itu, kita bisa bertindak secara berubah-ubah sesuai dengan konsekuensi yang ingin kita capai. Dengan demikian, hukum moral hanya akan menjadi perintah bersyarat.

Dalam perspektif etika Adam Smith, persoalan ini bisa dipecahkan dengan menggabungkan keduanya. Menurut Adam Smith, suatu tindakan dapat dinilai baik atau buruk berdasarkan motif pelakunya serta berdasarkan akibat atau tujuan dari tindakan itu. Ia mengkritik para filsuf moral seperti David Hume yang terlalu menekankan pentingnya akibat dalam menilai suatu tindakan, dan kurang memperhatikan motif pelaku. Maka, sama seperti Kant, Smith sangat menekankan pula pentingnya motif dan kemauan baik dari pelakunya.

Hanya saja, di pihak lain, bagi Adam Smith, motif dan kemauan baik saja tidak dengan sendirinya menentukan nilai suatu tindakan. Juga motif tidak dengan sendirinya membebaskan seseorang dari kesalahan moral karena tindakannya. Misalnya, seseorang yang tanpa sengaja membuang batu dari jendela rumah di lantai dua dan melukai atau bahkan membuat orang

yang lewat di bawah sana meninggal, jelas melakukan suatu tindakan yang salah secara moral, bukan karena motifnya untuk melukai atau membunuh, melainkan karena tindakannya itu berakibat merugikan orang lain. Di pihak lain, akibat saja tidak dengan sendirinya menentukan baik-buruk suatu tindakan. Ada tindakan yang memang berakibat baik, tetapi tindakan itu tidak bisa dinilai sebagai baik, karena akibat baik itu hanya merupakan suatu kebetulan. Sebaliknya, tindakan yang berakibat buruk tetapi dilakukan berdasarkan kemauan baik, misalnya mencuri untuk membeli obat demi menyelamatkan nyawa saudara yang sedang sakit parah, dapat dibenarkan karena ia mempunyai kemauan baik untuk menyelamatkan saudaranya kendati merugikan orang yang kecurian.

B. ETIKA TELEOLOGI

Istilah "teleologi" berasal dari kata Yunani telos, yang berarti tujuan, dan logos berarti ilmu atau teori. Berbeda dengan etika deontologi, etika teleologi menjawab pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu dengan melihat tujuan atau akibat dari suatu tindakan. Dengan kata lain, etika teleologi menilai baik-buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Jadi, terhadap pertanyaan, bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban etika teleologi adalah pilihlah tindakan yang membawa akibat baik.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa etika teleologi lebih bersifat situasional dan subyektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik.

Persoalannya, tujuan yang baik itu untuk siapa? Untuk kita pribadi, untuk pihak yang mengambil keputusan dan yang melaksanakan keputusan atau bagi banyak orang? Apakah tindakan tertentu dinilai baik hanya karena berakibat baik untuk kita, atau baik karena berakibat baik bagi banyak orang? Berdasarkan jawaban atas pertanyaan ini, etika teleologi bisa digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme etis dan utilitarianisme.

Egoisme etis menilai suatu tindakan sebagai baik karena berakibat baik bagi pelakunya. Kendati bersifat egoistis, tindakan ini dinilai baik secara

moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri akan dinilai baik secara moral. Sebaliknya, buruk kalau kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan.

Utilitarianisme menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan akibatnya bagi banyak orang. Etika utilitarianisme ini pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham dan orang-orang sezamannya adalah bagaimana menilai baik-buruk suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi dan legal secara moral. Singkatnya, bagaimana menilai sebuah kebijakan publik. Apa kriteria dan dasar obyektif yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk mengambil dan menilai sebuah kebijakan publik sebagai benar secara moral? Ini penting terutama karena kebijakan publik sangat mungkin diterima oleh kelompok yang satu, tetapi ditolak oleh kelompok yang lain karena merugikan.

Dalam mencari dasar obyektif tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar obyektif itu dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan publik membawa manfaat atau akibat yang berguna, atau sebaiknya kerugian bagi orang-orang terkait. Jadi, suatu kebijakan atau tindakan publik tidak dinilai sebagai baik atau buruk berdasarkan nilai kebijakan atau tindakan itu sendiri sebagaimana dalam teori deontologi.

Bagi Bentham dan para penganut teori utilitarianisme, dasar obyektif itu adalah manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan atau tindakan tersebut bagi banyak orang. Secara lebih terinci, kita dapat merumuskan dasar obyektif itu dalam tiga kriteria berikut. *Kriteria pertama* adalah *manfaat*, yaitu kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat tertentu. Jadi, kebijakan atau tindakan baik adalah kebijakan atau tindakan yang menghasilkan hal baik. Sebaliknya, akan dinilai buruk secara moral kalau mendatangkan kerugian atau hal buruk.

Kriteria kedua adalah *manfaat terbesar*, yaitu kebijakan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lain, atau dalam situasi di mana semua alternatif yang ada ternyata sama-sama mendatangkan kerugian, tindakan yang baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian terkecil.

Kriteria ketiga adalah *manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang*. Artinya, suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik kalau manfaat terbesar yang dihasilkan berguna bagi banyak orang. Semakin banyak orang yang menikmati akibat baik tadi, Semakin baik kebijakan atau tindakan tersebut.

Maka, di antara tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat, pilih yang manfaatnya terbesar dan di antara yang manfaatnya terbesar, pilih yang manfaatnya dinikmati paling banyak orang.

Secara singkat, prinsip yang dianut etika utilitarianisme adalah bertindaklah sedemikian rupa agar tindakanmu itu mendatangkan manfaat sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest good for the greatest number*). Tidak usah bersusah payah mencari norma dan nilai moral yang menjadi kewajiban kita. Yang perlu kita lakukan hanya menimbang-nimbang akibat dari suatu tindakan untuk melihat apakah bermanfaat atau merugikan.

Etika utilitarianisme mempunyai tiga keunggulan sebagai berikut. *Pertama*, kriterianya rasional. Maksudnya, utilitarianisme mendasarkan penilaian dan pertimbangan moral pada kriteria rasional. Ketiga kriteria obyektif utilitarianisme tersebut di atas bisa diterima masuk akal oleh siapa saja yang berhadapan dengan dilema dan pilihan moral yang sulit. Dalam situasi dilematis, ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, kita diberi kriteria rasional dan jelas. Ada pegangan yang membuat kita mengambil keputusan moral secara lebih mudah. Ada dasar rasional mengapa kita memilih alternatif yang satu dan mengabaikan yang lain.

Kedua, etika utilitarianisme menghargai kebebasan setiap individu dalam menentukan sikap moral, dalam mengambil keputusan dan tindakan. Maksudnya, kita tidak dibebani begitu saja oleh norma dan nilai moral yang sudah umum berlaku, tetapi dibiarkan untuk memilih sendiri tindakan yang kita nilai benar berdasarkan ketiga kriteria tersebut. Kita tidak lagi dipaksa untuk sekadar mematuhi norma dan nilai tertentu (tetapi mengapa saya harus mematuhi?) Kita melakukan tindakan tertentu (yang sesuai dengan norma dan nilai moral tertentu) karena memang tindakan itu dalam pertimbangan kita mendatangkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Kita mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri sekaligus mempertanggungjawabkan mengapa kita memilih tindakan tersebut.

Ketiga, unsur positif yang lain adalah bahwa utilitarianisme lebih mengutamakan kepentingan banyak orang daripada kepentingan sendiri atau segelintir orang. Maksudnya, dasar pertimbangan mengapa suatu tindakan dipilih dan bukan yang lainnya karena tindakan tersebut membawa manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, utilitarianisme tidak bersifat egoistis. Semakin banyak orang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan atau tindakan, semakin baik kebijakan atau tindakan tersebut. Utilitarianisme tidak

mengukur baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok.

Ketiga keunggulan ini yang menyebabkan etika utilitarianisme banyak dipakai—secara sadar ataupun tidak—dalam berbagai kebijakan dan tindakan publik. Idealnya, suatu kebijakan publik membawa manfaat atau menguntungkan bagi semua orang dan pihak terkait. Dalam banyak kasus, ini tidak mungkin karena semua orang mempunyai kepentingan yang berbeda. Secara moral, suatu kebijakan akan dinilai benar secara moral, kalau memenuhi ketiga kriteria tersebut. Ketika kita tidak bisa memuaskan semua orang, kebijakan tersebut dinilai sebagai baik secara moral, kalau paling tidak sebagian terbesar orang atau pihak terkait diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

Hanya saja, etika utilitarianisme pun tidak luput dari kelemahan. Walaupun sepanjang sejarahnya merupakan sebuah teori etika yang sangat populer dan banyak digunakan, utilitarianisme tidak luput dari berbagai kritik. *Pertama*, kritik yang paling keras adalah utilitarianisme membenarkan ketidakadilan. Maksudnya, dengan membenarkan suatu kebijakan atau tindakan hanya karena membawa manfaat bagi sebagian besar orang, utilitarianisme telah membenarkan kebijakan atau tindakan tersebut merugikan kepentingan sebagian kecil orang yang tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan atau tindakan tadi. Kendati ada segelintir orang yang haknya dirugikan, kebijakan tersebut dianggap benar hanya karena membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Jelas ini tidak adil. Ia membenarkan adanya tumbal. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima kenyataan itu, kalau kita sendiri termasuk di dalam kelompok sebagian kecil yang dirugikan? Tentu tidak. Lalu mengapa kebijakan itu dibenarkan hanya karena ada sebagian besar orang diuntungkan?

Kedua, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas, sehingga dalam kenyataan praktis menimbulkan kesulitan. Susahnya, lebih sering manfaat tersebut dilihat dalam kerangka kuantitas materialistis. Sering kali kita membenarkan suatu kebijakan atau tindakan hanya karena kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat material. Manfaat non-material seperti nama baik, kesehatan, hak, dan semacamnya sering tidak diperhitungkan.

Ketiga, sering kali beberapa variabel sulit di kuantifikasi sehingga tidak mudah untuk menentukan manakah manfaat terbesar dibandingkan dengan yang lainnya. Keselamatan kerja, lingkungan hidup, rusaknya hutan, rusaknya terumbu karang, polusi udara dan seterusnya sulit di kuantifikasi

untuk menentukan manfaat terbesar. Dalam hal ini, etika utilitarianisme sangat membenarkan pelepasan tanaman transgenik, misalnya, hanya karena mendatangkan manfaat ekonomis material yang besar. Atau, pengerukan pasir akan dibenarkan karena manfaat ekonomis-material yang besar.

Keempat, manfaat yang dimaksudkan oleh etika utilitarianisme sering dilihat dalam jangka pendek. Padahal, dalam menilai akibat suatu tindakan kita harus melihatnya dalam jangka panjang. Ini sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan di bidang lingkungan. Manfaat dan kerugian lingkungan tidak selalu bisa dilihat dan diukur dalam jangka pendek. Apalagi dalam perspektif etika, banyak dampak yang berkaitan dengan nilai moral baru bisa dilihat jauh setelah kebijakan atau tindakan dilaksanakan.

Kelima, utilitarianisme tidak menganggap serius nilai suatu tindakan, atau lebih tepat lagi nilai sebuah norma atau kewajiban melainkan hanya memperhatikan akibatnya. Dengan begitu, utilitarianisme sangat mungkin membenarkan peredaran narkoba dan perdagangan perempuan, misalnya, karena tindakan itu mendatangkan manfaat besar. Padahal, jelas-jelas melanggar norma dan nilai moral. Itu sebabnya mengapa Kant beranggapan bahwa kalau akibat menjadi tolok ukur penilaian moral atas suatu tindakan, hilanglah universalitas moral, karena setiap tindakan bisa mendapat penilaian moral yang berbeda berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Demikian pula utilitarianisme tidak pernah menganggap serius motivasi yang ada di balik tindakan itu.

Keenam, seandainya ketiga kriteria tersebut saling bertentangan, ada kesulitan dalam menentukan prioritas di antara ketiganya. Misalnya saja, tindakan A mempunyai manfaat 40 persen, tetapi dinikmati oleh 60 persen orang. Tindakan B membawa manfaat 60 persen, tetapi dinikmati oleh 40 persen orang. Manakah yang harus diprioritaskan: manfaat terbesar atau jumlah orang paling banyak yang menikmati manfaat tersebut kendati manfaatnya lebih kecil?.

Para filsuf penganut etika utilitarianisme menyadari kelemahan-kelemahan etika ini. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar yang disodorkan adalah, dengan membedakan dua tingkatan etika utilitarianisme: utilitarianisme aturan dan utilitarianisme tindakan. Dengan pembedaan ini, maka, *pertama*, harus dicek terlebih dahulu apakah kebijakan dan tindakan itu sejalan dengan aturan atau norma moral yang ada atau tidak. Kalau tidak sejalan, kebijakan atau tindakan itu ditolak, kendati membawa manfaat yang

besar. Kasus seperti peredaran narkoba dan perdagangan perempuan harus ditolak kendati membawa manfaat besar, karena bertentangan dengan norma dan nilai moral. Sebaliknya, kalau tidak bertentangan dengan norma atau nilai moral tertentu, kita dapat menggunakan ketiga kriteria tersebut untuk menentukan apakah kebijakan atau tindakan itu dipilih atau ditolak. Dengan jalan ini, norma dan nilai moral tidak diabaikan begitu saja hanya karena suatu kebijakan atau tindakan membawa manfaat terbesar.

Kedua, dalam menilai suatu kebijakan dan tindakan berdasarkan akibatnya, kita jangan hanya melihat akibat material fisik melainkan juga perlu memperhitungkan akibat non-material, termasuk kerusakan mental dan moral, serta kehancuran lingkungan. Demikian pula, manfaat tersebut jangan hanya dilihat dalam kerangka jangka pendek melainkan juga jangka panjang. Kendati dalam jangka pendek suatu kebijakan atau tindakan ternyata menuntut biaya tinggi, tetapi ternyata dalam jangka panjang jauh lebih menguntungkan: bukan hanya dari segi ekonomi melainkan juga dari segi kesehatan, lingkungan, mental, moral, budaya. Hal itu harus dinilai positif dan dipilih daripada kebijakan dan tindakan yang membawa manfaat jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang jauh lebih merugikan.

Ketiga, dalam kasus ketika kita terpaksa mengambil kebijakan dan tindakan yang tidak bisa menguntungkan semua pihak, dan terpaksa-karena tidak ada alternatif lain yang lebih baik mengorbankan kepentingan segelintir orang, jalan keluar yang paling baik adalah, dengan pendekatan pribadi untuk bisa memberi kesempatan kepada pihak yang dikorbankan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka perlu didengar dan berusaha mencari jalan keluar, termasuk kompensasi yang mungkin tidak maksimal, tetapi bisa diterima. Dalam hal ini, penting sekali pendekatan yang memperlihatkan bahwa kita tidak bermaksud mengabaikan hak dan kepentingan mereka, bahkan sangat menghargai mereka, termasuk aspirasi, hak dan kepentingan mereka. Namun, tidak ada alternatif kebijakan lain yang lebih baik. Dengan komunikasi, dengan kompensasi yang bisa di terima, secara moral kita berusaha memperkecil kerugian material, mental, dan moral yang dialami pihak yang terpaksa dikorbankan. Dengan cara itu, kita telah memenuhi salah satu hukum universal Kant, yaitu memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabat luhur yang tidak boleh diperalat bagi kepentingan orang lain. Dengan jalan itu, kita memperlihatkan sikap hormat kita kepada kepentingan mereka, yang sesungguhnya tidak ingin kita korbankan, tetapi apa boleh buat karena tidak ada cara lain maka dengan sangat terpaksa kita korbankan, tetapi dengan kompensasi yang memuaskan mereka.

C. ETIKA KEUTAMAAN

Berbeda dengan kedua teori etika yang pertama yaitu etika deontologi dan etika teleologi, maka etika keutamaan (*virtue ethics*) tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Juga, tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang.

Dalam kaitan dengan itu, sebagaimana dikatakan Aristoteles, nilai moral ditemukan dan muncul dari pengalaman hidup dalam masyarakat, dari teladan dan contoh hidup yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh besar dalam suatu masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan hidup ini. Di sana kita menemukan nilai moral tertentu, dan belajar mengembangkan dan menghayati nilai tersebut. Jadi, nilai moral bukan muncul dalam bentuk adanya aturan berupa larangan dan perintah, melainkan dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Dari teladan hidup orang-orang itu kita mengenal dan belajar nilai dan keutamaan moral seperti kesetiaan, saling percaya, kejujuran, ketulusan, kesediaan berkorban bagi orang lain, kasih sayang, kemurahan hati, dan sebagainya.

Dengan demikian, etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah dan cerita-termasuk cerita dongeng dan wayang. Dari sejarah-khususnya sejarah kehebatan moral para tokoh benar dan dari cerita dongeng ataupun sastra kita belajar tentang nilai dan keutamaan, serta berusaha menghayati dan mempraktikkannya seperti tokoh dalam sejarah, dalam cerita, atau dalam kehidupan masyarakat. Tokoh dengan teladannya menjadi model untuk kita tiru.

Jadi, dalam menjawab pertanyaan bagaimana kita harus bertindak secara moral dalam situasi konkret yang dilematis, etika keutamaan menjawab, teladanilah sikap dan perilaku moral tokoh-tokoh yang kita kenal, baik dalam masyarakat, sejarah atau dalam cerita yang kita ketahui, ketika mereka menghadapi situasi serupa. Lakukan seperti yang dilakukan para tokoh moral itu. Itulah tindakan yang benar secara moral.

Menurut teori etika keutamaan, orang bermoral tidak pertama-tama ditentukan oleh kenyataan bahwa dia melakukan suatu tindakan bermoral pada kasus tunggal tertentu. Pribadi moral terutama ditentukan oleh kenyataan seluruh hidupnya, yaitu bagaimana dia hidup baik sebagai manusia sepanjang hidupnya. Jadi, bukan tindakan satu per satu yang menentukan

kualitas moralnya. Akan tetapi, apakah dalam semua situasi yang dihadapi ia mempunyai posisi, kecenderungan, sikap dan perilaku moral yang terpuji serta sikap dan perilakunya tidak pernah berubah. Maka, yang dicari adalah keutamaan, *excellence*, kepribadian moral yang menonjol. Ia dikenal sebagai orang yang terpuji secara moral dan karena itu terpuji/terhormat. Dia tahan terhadap setiap godaan untuk menyimpang dari sikap dasarnya. Dia adalah orang yang berprinsip, yang mempunyai integritas moral yang tinggi sebagaimana dipelajari dari tokoh-tokoh besar dalam hidupnya atau dari sejarah dan cerita-cerita yang diketahuinya. Pribadi yang bermoral adalah orang yang berhasil mengembangkan suatu disposisi, sikap, dan kecenderungan moral melalui kebiasaan yang baik sehingga perilaku dan perbuatannya selalu bermoral. Ia bukan orang yang sekadar melakukan sesuatu yang adil (*doing something that is just*), melainkan orang yang adil sepanjang hidupnya (*being a just person*). Ia bukan sekadar orang yang melakukan tindakan yang baik, melainkan orang yang baik.

Keunggulan teori ini adalah, moralitas dalam suatu masyarakat dibangun, melalui cerita. Melalui cerita dan sejarah disampaikan pesan-pesan, nilai-nilai, dan keutamaan-keutamaan moral agar ditiru dan dihayati oleh anggota masyarakat. Orang juga belajar moralitas melalui keteladanan nyata dari tokoh, pemimpin atau orang yang dihormati dalam masyarakat tersebut. Ada contoh nyata yang bisa ditiru dan dari sana menjalar perilaku moral tersebut kepada banyak orang. Keutamaan moral tidak diajarkan melalui indoktrinasi, perintah dan larangan, tapi teladan dan contoh nyata, khususnya dalam menentukan sikap di dalam situasi yang dilematis.

Etika keutamaan sangat menghargai kebebasan dan rasionalitas manusia, karena pesan moral hanya disampaikan melalui cerita dan teladan hidup para tokoh lalu membiarkan setiap orang untuk menangkap sendiri pesan moral itu. Juga, setiap orang dibiarkan untuk menggunakan akal budinya untuk menafsirkan pesan moral itu. Artinya, terbuka kemungkinan setiap orang mengambil pesan moral yang khas bagi dirinya, dan melalui itu kehidupan moral menjadi sangat kaya oleh berbagai penafsiran.

Sesungguhnya agama, dengan Kitab-kitab Suci dan tokoh-tokohnya berupa para nabi, melakukan hal yang sama. Melalui cerita dalam Kitab Suci, baik tentang perumpamaan tertentu, kasus tertentu atau tentang perbuatan nabi tertentu, umat diajarkan tentang nilai dan keutamaan moral tertentu dan diharapkan untuk meneladani dan menghayati nilai dan keutamaan moral itu dalam hidupnya. Demikian pula, sepanjang sejarah agama tersebut, muncul

orang kudus, martir, dan orang saleh yang melalui teladannya mengajarkan keutamaan, nilai moral, dan hal baik yang harus dilakukan. Sayangnya, etika keutamaan pada setiap agama ini luntur atau bahkan hilang ditelan kecenderungan dogmatisme dan indoktrinasi yang begitu kuat pada agama-agama itu.

Akan tetapi, kelemahan etika keutamaan ini adalah, *pertama*, dalam masyarakat pluralistik, akan muncul berbagai keutamaan moral yang berbeda-beda sesuai dengan sumber budaya dan agama, atau cerita dan sejarah yang diajarkan. Kedua, dalam masyarakat modern di mana cerita-apalagi cerita dongeng-tidak diberi tempat, moralitas bisa kehilangan relevansinya. Ketiga, dalam masyarakat di mana sulit ditemukan adanya tokoh publik yang bisa menjadi teladan moral, moralitas akan mudah hilang dari masyarakat tersebut. Ini terutama terjadi dalam masyarakat materialistis seperti sekarang ini. Contoh dan teladan yang kita temukan sehari-hari adalah contoh dan teladan bagaimana menjadi kaya, termasuk melalui cara yang tidak halal, seperti korupsi, bisnis yang curang, dan sebagainya.

Hal yang menarik dari etika keutamaan ini adalah kita perlu membangun watak, karakter dan kepribadian moral. Dalam kaitan dengan itu, peran pemimpin dan tokoh publik sangat penting untuk memberi teladan yang baik dalam hal kehidupan moral. Demikianlah uraian Kegiatan Belajar 2, Modul 1. tentang pengertian teori etika. Anda dapat mengukur pemahaman terhadap materi ini dengan mengerjakan Latihan dan Tes Formatif berikut. Jika Anda telah menguasainya dengan baik, silahkan lanjut ke Modul 2.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Teori Etika, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori etika!
- 2) Jelaskan mengenai tiga teori etika!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Baca kembali bagian yang berkaitan dengan teori etika, contohnya, berkaitan dengan refleksi kritis, bagaimana kita harus bertindak dalam suatu situasi konkret tertentu.
- 2) Baca kembali bahasan mengenai deontologi, teleologi, dan keutamaan



RANGKUMAN

Teori-teori etika penting untuk dibahas secara mendalam terutama dalam menjawab pertanyaan moral: "Apa yang harus saya lakukan?", "Bagaimana harus bertindak?", khususnya di bidang pengelolaan lingkungan. Pembahasan teori etika akan membantu kita terutama dalam beberapa hal berikut ini. *Pertama*, mengembangkan perilaku baik secara individu maupun kelompok dalam kaitan dengan lingkungan. *Kedua*, mengembangkan sistem sosial dan politik yang ramah terhadap lingkungan serta mengambil keputusan dan kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan. Karena etika berkaitan dengan refleksi kritis, untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kita harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, ada tiga jawaban berbeda. Jawaban pertama dikenal sebagai teori deontologi, jawaban kedua dikenal sebagai teori teleologi, dan jawaban ketiga dikenal sebagai etika keutamaan. Ketiga teori etika ini juga berguna untuk menjawab pertanyaan, bagaimana menilai suatu tindakan yang baik secara moral?.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) *Deon*, sebagai asal kata deontologi dari bahasa Yunani memiliki pengertian sebagai
 - A. pengamanan
 - B. kewajiban
 - C. pengelolaan
 - D. pemberian

- 2) Membuang limbah ke sungai akan dinilai sebagai tindakan buruk jika dihubungkan dengan teori deontologi karena
 - A. tidak sesuai dengan kewajiban moral untuk hormat kepada alam
 - B. tidak sesuai dengan sifat yang harus dimiliki seorang kholifah
 - C. memerlukan suatu tindakan perbaikan
 - D. memiliki akibat yang merugikan masyarakat

- 3) Jika suatu tindakan dinilai buruk karena tidak sesuai dengan kewajiban moral untuk hormat kepada alam, maka etika deontologi untuk bertindak sesuai dengan kewajiban menekankan hal-hal berikut, *kecuali*

- A. motivasi
 - B. kemauan yang baik
 - C. watak yang kuat
 - D. kewajiban
- 4) Kata "telos" dalam teleologi berasal dari kata dalam bahasa
- A. Sanskerta
 - B. Yunani
 - C. Spanyol
 - D. Latin
- 5) Salah satu teori etika yang bersifat situasional dan obyektif adalah etika
- A. deontologi
 - B. teleologi
 - C. keutamaan
 - D. lingkungan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) A
- 3) A
- 4) B
- 5) A

Tes Formatif 2

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) B
- 5) B

Glosarium

- Ecosophy* : gerakan kearifan merawat bumi sebagai sebuah rumah tangga untuk menjadikannya tempat yang nyaman bagi semua kehidupan.
- Umweltfreies Wesen* : manusia sebagai makhluk bebas lingkungan di mana secara morfologis manusia tidak terikat oleh lingkungan tertentu .

Daftar Pustaka

- Gehlen, Arnold. 1940. *Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt.* (1940) (Translated as "Man, his nature and place in the world")
- Hartanto, Puji. 2006. *Membangun Harmonisasi dengan Alam.*
<http://www.freelists.org/archives/ppi/01-2006/msg00562.html>
- http://id.wikipedia.org/wiki/David_Hume
- http://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
- http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
- John Casey. 1992. *Pagan Virtue: An Essay in Ethics.* Oxford: Calrendon Press.
- Keraf, Sonny A. 2002. *Etika Lingkungan.* Cetakan ketiga, Desember 2006. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Kirom, Syahrul. 2006. *Membangun Kesadaran Etika Lingkungan.*
www.balipost.com/balipostcetak/2006/4/25/o2.htm.
- Krisnamurti. 2005. *Ekonomi dalam Lingkungan: Ecodevelopment plus Etika Lingkungan Hidup.* <http://krisnaster.blogspot.com/2005/09/ekonomi-dalam-lingkungan.html>
- Naess, Arne. 1973. *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement.* Inquiry 16: 95-100
- Naess, Arne. 1989. *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy* Translated by D. Rothenberg. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ross, W. D. 1930. *The Right and the Good.* Reprinted with an introduction by Philip Stratton-Lake. 2002. Oxford: Oxford University Press.

- Syaroni, Irham. 2007. *Refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia*. Koran Merapi, Selasa 5 Juni 2007
<http://irhamku.blogspot.com/2007/06/refleksi-hari-lingkungan-hidup-sedunia.html>
- Wildensyah, Iden. 2006. *Mewujudkan Kampus Berwawasan Lingkungan*.
<http://penakayu.blogdrive.com/archive/77.html>